

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Moin. (2010). *Merger, Akuisisi dan Divestasi. Edisi 2*. Ekonisia
- Akhmad Suraji, dkk. (2021). *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan dan Isu yang belum terselesaikan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Hariyani, Iswi., dkk. (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. VisiMedia.
- Lubiantara, B. (2002). *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*.
- Mamudja, S. S. & S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju.
- Margono, S. (2013). *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pudyantoro, A. R. (2015). *Dialog: Tanya Jawab Migas*. UP 45 Press - Universitas Proklamasi 45.
- Pudyantoro, A. R. (2019). *Bisnis Hulu Migas, Mengurai Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sirait, N. N. (2011). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sunggono, B. (2003a). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yance Arizona. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press.

B. Jurnal

Edi Wibowo, S. (2013). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Zen, Ahita Nur Aisyah dan Nurkholis, Ph.D., Ak., CA., “Analisis Participating Interest (PI) dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Pemerintah Daerah dan Swasta (Studi Kasus pada Sektor Migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro)” *Journal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 2, No. 1, Universitas Brawijaya.

C. Tugas Akhir

Aminoto, Steffi Rap Ratu M (2016). “Analisis Konsistensi *Branch Profit Tax* atas Transaksi Pengalihan Participating Interest oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

P., G. H. (2021). “Pelaksanaan Pengalihan *Participating Interest* Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kepada Pihak Lain Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” Tesis, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sinaga, Agustinus B. (2021). “Analisis Ketentuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Participating Interest Tidak Langsung yang Mengandung Transaksi Pengalihan Piutang oleh Kontraktor Sektor Hulu Migas (Studi Putusan MA Nomor 4003/B/PK/Pjk/2019)”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tamano, Muhammad Alrasyid Tamano (2020). “Perlindungan Hukum Pemegang Participating Interest Minoritas pada Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Mahakam”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Artikel

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. (2021, June 7). *Participating Interest 10 Persen Tingkatkan Pendapatan Daerah*. <https://migas.esdm.go.id/post/read/participating-interest-10-persen-tingkatkan-pendapatan-daerah>

DPR. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi. In *Naskah Akademik*. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170524-082813-3567.pdf>

Masedi, A. (2021, November 3). *Tinjauan Fiskal atas Sektor Hulu Migas di Indonesia*. <https://Opini.Kemenkeu.Go.Id/Article/Read/Tinjauan-Fiskal-Atas-Sektor-Hulu-Migas-Di-Indonesia>.

<https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/tinjauan-fiskal-atas-sektor-hulu-migas-di-indonesia>

Pratama, D. (2014, April). *Mengenal Kontrak Hulu Migas Indonesia*. www.skkmigas.go.id. <https://www.skkmigas.go.id/berita/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia>

Rahma, A. (2022, June). *SKK Migas Klaim Iklim Investasi di Indonesia masih Kompetitif*. <https://www.idxchannel.com/economics/skk-migas-klaim-iklim-investasi-di-indonesia-masih-kompetitif>

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang – Indische Mijwet, Staatsblad Tahun 1899 No. 214;

Undang-Undang-Undang No. 10 tahun 1899 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan;

Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P. N. Permina);
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10%;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Sama nya yang sebagaimana telah mengalami beberapa kali pencabutan, dengan peraturan yang paling terkini yaitu Peraturan Menteri enegi dan Sumber Daya Mineral No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang akan Berakhir;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak sehat

Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan.

F. Internet

Binus University School of Accounting, “Mengenal Apa itu Sustainable Business”, <https://accounting.binus.ac.id/2023/05/08/mengenal-apa-itu-sustainable-business/> diakses pada 5 Februari 2023.

Explore the Energy Glossary
https://glossary.slb.com/Terms/p/participating_interest.aspx, diakses pada 26 Oktober 2022.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Redefinisi Kelembagaan KPPU Sangat Penting Dilakukan” <https://kppu.go.id/blog/2020/07/redefinisi-kelembagaan-kppu-sangat-penting-dilakukan/#:~:text=Hamdan%20Zoelva%20yang%20juga%20pernah,lebih%20lanjut%20dari%20UUD%201945>. diakses pada 24 Januari 2024.

Lavinda, “Indonesia jadi Pasien Malpraktik IMF”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180502043045-532-294986/indonesia-jadi-pasien-malpraktik-imf> diakses pada 18 Oktober 2022

Otoritas Jasa Keuangan, “Self-Regulatory Organizations”
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/269> diakses pada 23 Januari 2024.

Willa Wahyuni, “Tips Memilih antara Akuisisi Saham atau Akuisisi Aset”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-memilih-antara-akuisisi-saham-atau-akuisisi-aset-lt6531d0388a88b/?page=1> diakses pada 26 Januari 2024.